



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, diperlukan perencanaan secara holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

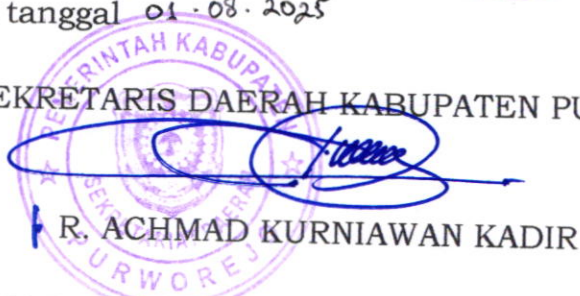
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 01 Agustus 2025



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 01.08.2025

P.j SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 22 SERI E NOMOR 19

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan diawali dari penyusunan perencanaan yang baik dengan tujuan, sasaran maupun target yang diharapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 diatas terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan daerah yang telah disusun tersebut perlu dijabarkan lagi oleh setiap perangkat daerah selaku pelaksana pembangunan di daerah kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah sebagai pedoman operasional penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau yang biasa disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja perangkat daerah yang disusun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan-tahapan penyusunan tersebut meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

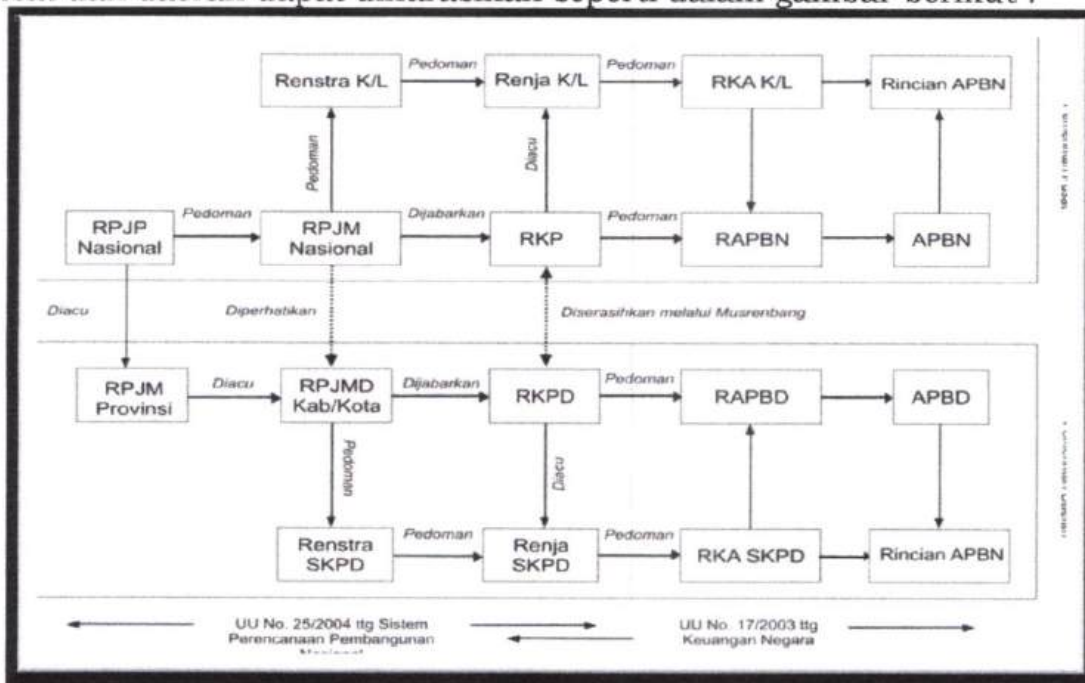
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pelaksanaan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional memiliki saling keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lain. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

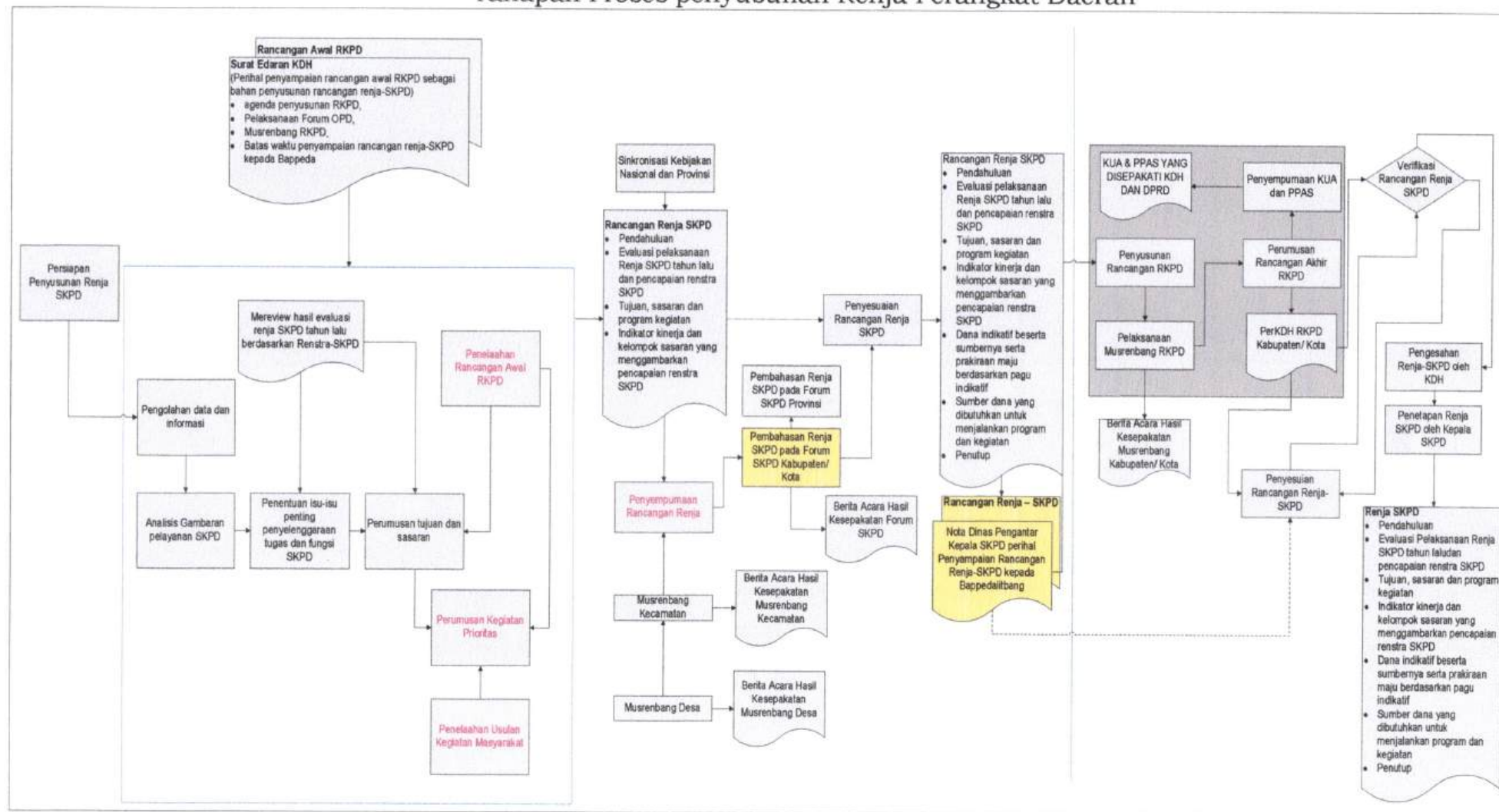
Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya serta melihat dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program kegiatan dilakukan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun perencanaan. Sistematis hubungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah dapat dinarasikan seperti dalam gambar berikut :



*Sumber Data : Permendagri 86/2017, Permendagri 22/2018

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan Perangkat Daerah secara lebih konkret dan terukur. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang akan dirangkum menjadi bahan penyusunan RAPBD Kabupaten tahun berkenaan.

Gambar 1.1
Tahapan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 31 Seri E Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2)
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dilaksanakan dengan maksud :

- a. Menjabarkan rencana strategis perangkat daerah dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah jangka pendek (1 tahun).
- b. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan, sasaran dan target capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan Rencana Tindak Lanjut secara garis besar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menyajikan pengukuran terhadap hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama tahun 2024. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 dan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian perangkat daerah dalam memenuhi target sasaran program kegiatan yang ditetapkan dan hambatan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan dalam merealisasikan fisik kegiatan dan penggunaan anggaran program/kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat berupa efisiensi alokasi belanja sesuai kebutuhan pencapaian target, penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target, penyesuaian indikator dan target kinerja keluaran/hasil kegiatan; dan perumuskan kembali kegiatan prioritas dan lanjutan untuk percepatan pencapaian target.

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja renja dan renstra berdasarkan evaluasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 secara umum telah diselenggarakan semua sesuai target program kegiatan yang telah direncanakan namun masih terdapat subkegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tahun 2024 adalah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Dari target kinerja 4 laporan hanya tercapai 2 laporan. Hal ini dikarenakan pada subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum. Sampai dengan akhir tahun 2024 hanya terdapat 2 permintaan penanganan dari Aparat Penegak Hukum dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan permintaan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Program/kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi target kinerja. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran dan target kinerja menyesuaikan kebutuhan dan perubahan jadwal kinerja. Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tahun 2024 antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen tercapai 3 dokumen, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target 19 dokumen tercapai 19 dokumen;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari target 16 laporan tercapai 16 laporan;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 3 laporan tercapai 3 laporan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari target 64 orang/bulan tercapai 65 orang/bulan
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dari target 12 dokumen tercapai 12 dokumen;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari target 6 laporan tercapai 6 laporan;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dari target 26 laporan tercapai 26 laporan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dari target 2 dokumen tercapai 2 dokumen;
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dari target 2 laporan tercapai 2 laporan.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dari target 1 dokumen tercapai 1 dokumen;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari target 120 orang tercapai 120 orang;
 - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dari target 130 orang tercapai 130 orang;
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan dari target 100 orang tercapai 100 orang.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dari target 1 paket tercapai 1 paket;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari target 1 paket tercapai 1 paket;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari target 3 paket tercapai 3 paket;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari target 12 paket tercapai 12 paket;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari target 2 paket tercapai 2 paket;

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari target 1 dokumen tercapai 1 dokumen;
 - 7) Penyediaan Bahan/ Material dari target 1 paket tercapai 1 paket;
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu dari target 12 laporan tercapai 12 laporan;
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target 12 laporan tercapai 12 laporan;
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dari target 4 dokumen tercapai 4 dokumen;
 - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dari target 2 dokumen tercapai 2 dokumen.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 3 jenis tercapai 3 jenis, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
- 1) Pengadaan Mebel dari target 1 unit tercapai 1 unit;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari target 7 unit tercapai 7 unit;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari target 2 unit tercapai 2 unit.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 3 laporan tercapai 3 laporan, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari target 12 laporan tercapai 12 laporan;
 - 2) Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target 12 laporan tercapai 12 laporan;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target 12 laporan tercapai 12 laporan.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 5 jenis tercapai 5 jenis, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan dari target 1 unit tercapai 1 unit;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari target 5 unit tercapai 5 unit;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari target 68 unit tercapai 68 unit;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari target 1 unit tercapai 1 unit;
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari target 26 unit tercapai 26 unit
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
- 1) Reviu Laporan Kinerja dari target 3 laporan tercapai 3 laporan;
 - 2) Reviu Laporan Keuangan dari target 71 laporan tercapai 71 laporan;
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 6 dokumen tercapai 6 dokumen.

- j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasandari target 3 rekomendasi tercapai 3 rekomendasi;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasandari target 3 rekomendasi tercapai 4 rekomendasi.
 - k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan target 100% tercapai 100%, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dari target 6 perangkat daerah tercapai 6 perangkat daerah;
 - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari target 3 kegiatan tercapai 3 kegiatan;
 - 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dari target 165 perangkat daerah tercapai 165 perangkat daerah.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Hasil evaluasi pelaksanaan renja yang dilaksanakan menemukan terdapat Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2024 antara lain:
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dari target 119 laporan tercapai 120 laporan;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dari target 119 laporan tercapai 120 laporan;
 - 3) Pengawasan Desa dari target 83 laporan tercapai 85 laporan;
 - 4) Kerjasama Pengawasan Internal dari target 3 kesepakatan tercapai 4 kesepakatan;
 - 5) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target 115 laporan tercapai 153 laporan;
 - 4) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dari target 182 perangkat daerah tercapai 212 perangkat daerah.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- Faktor pendorong yang menjadi penyebab kegiatan bisa memenuhi/melebihi target kinerja antara lain:
- a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. Komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - c. Komitmen Tim dan manajemen Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan.
 - d. Peningkatan kompetensi APIP melalui keikutsertaan diklat.
- Faktor penghambat yang menjadi penyebab kegiatan belum bisa memenuhi target kinerja antara lain:
- a. Perubahan kebijakan dan pedoman dari Pemerintah Pusat yang dinamis

- b. Belum optimalnya kerjasama pengawasan internal dengan Aparat Penegak Hukum dan APIP lainnya.
 - c. Perangkat daerah/obyek pengawasan tidak siap dengan data yang diperlukan pada pelaksanaan pemeriksaan
 - d. Respon perangkat daerah/mitra pengawasan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
 - e. Keterlambatan penyelesaian laporan Hasil Pemeriksaan.
 - f. Kompetensi SDM pengawasan yang belum merata.
 - g. Keterbatasan personil dan waktu penugasan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra perangkat daerah antara lain:
- a. Tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dapat tidak tercapai.
 - b. Target capaian program renstra tidak terealisasi sesuai rencana yang ditetapkan.
 - c. Anggaran program/kegiatan tidak terealisasi secara maksimal
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Kebijakan/ tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah:
- a. Melakukan evaluasi secara berkala dan perbaikan perencanaan penganggaran pada tahun berikutnya
 - b. Melakukan komunikasi dengan obyek pengawasan terkait data yang diperlukan.
 - c. Meningkatkan kendali mutu pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyusunan laporan,
 - d. Melakukan evaluasi pelaporan dan percepatan penyelesaian LHP yang masih belum selesai.
 - e. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan rapat koordinasi pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan mitra pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - g. Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama pengawasan dengan Aparat penegak hukum dan APIP lainnya.
 - h. Melakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan program kerja pengawasan tahunan pada tahun berikutnya
 - i. Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan sertifikasi keahlian.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini.

Tabel T-C.29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06					Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.									
06	01				Bidang Urusan Inspektorat Daerah									
06	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	01	201		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	23 Dokumen	14 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	20 Dokumen	86,96%
06	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89 Dokumen	30 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	68 Dokumen	76,40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100,00%
06	01	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100,00%
06	01	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100,00%
06	01	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	32 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	64 Laporan	80,00%
06	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	8 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	5 Laporan	16 Laporan	69,56%
06	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
06	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	319 Orang	132 Orang	64 Orang/bulan	65 Orang/bulan	101,56%	64 Orang/bulan	261 Orang	81,82%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	48 Dokumen	80,00%
06	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	24 Laporan	80,00%
06	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	130 Laporan	52 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100%	26 Laporan	104 Laporan	80,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
06	01	01	203	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	7 Dokumen	77,78%
06	01	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	7 Laporan	77,78%
06	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
06	01	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	205	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00%
06	01	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
06	01	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	490 Orang	138 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	62 Orang	321 Orang	65,51%
06	01	01	205	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	520 Orang	177 Orang	130 Orang	130 Orang	100%	63 Orang	370 Orang	71,15%
06	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430 Orang	112 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	0 Orang	212 Orang	49,30%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
06	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	71,43%
06	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	0 Paket	3 Paket	60,00%
06	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	7 Paket	70,00%
06	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 Paket	82,76%
06	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	24 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	28 Paket	93,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	,85,71%
06	01	01	206	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80,00%
06	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
06	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
06	01	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	80,00%
06	01	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	14 Jenis	7 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	2 Jenis	12 Jenis	85,71%
06	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	100,00%
06	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	150,00%
06	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	64 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	67 Unit	103,08%
06	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165 Unit	81 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	0 Unit	88 Unit	53,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	207	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	-	-	-	-	0 Unit	0,00%
06	01	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	11 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	15 Unit	88,23%
06	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	12 Laporan	80,00%
06	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
06	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
06	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu	26 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	16 Jenis	61,54%
06	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80,00%
06	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	21 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	4 Unit	30 Unit	103,44%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	100,00%
06	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395 Unit	156 Unit	68 Unit	68 Unit	100%	68 Unit	292 Unit	73,92%
06	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80,00%
06	01	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124 Unit	49 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	24 Unit	99 Unit	79,83%
06	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	28 Dokumen	80,00%
06	01	02	201	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	534 Laporan	280 Laporan	119 Laporan	120 Laporan	100,84%	50 Laporan	450 Laporan	84,26%
06	01	02	201	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	617 Laporan	310 Laporan	137 Laporan	192 Laporan	140,14%	109 Laporan	598 Laporan	94,81%
06	01	02	201	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	7 Laporan	116,67%
06	01	02	201	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	273 Laporan	62 Laporan	71 Laporan	71 Laporan	100%	28 Laporan	161 Laporan	58,97%
06	01	02	201	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	321 Laporan	188 Laporan	83 Laporan	85 Laporan	102,40%	29 Laporan	302 Laporan	94,08%
06	01	02	201	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8 Kesepakat an	4 Kesepakata n	3 Kesepakat an	4 Kesepakata n	133.33%	1 Kesepakata n	9 Kesepakata n	112,50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	02	201	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	320 Dokumen	284 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	296 Dokumen	92,50%
06	01	02	202		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	8 laporan	80,00%
06	01	02	202	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32 Laporan	18 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	22 Laporan	68,75%
06	01	02	202	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	385 Laporan	251 Laporan	115 Laporan	153 Laporan	133,04%	111 Laporan	515 Laporan	133,76%
06	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	80,00%
06	01	03	201	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	3 Rekomendasi	12 Rekomendasi	80,00%
06	01	03	201	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	16 Rekomendasi	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	2 Rekomendasi	22 Rekomendasi	146,67%
06	01	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	20 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	16 laporan	80,00%
06	01	03	202	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	12 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100%	6 perangkat daerah	24 perangkat daerah	80,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	03	202	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	675 perangkat daerah	237 perangkat daerah	182 perangkat daerah	212 perangkat daerah	100%	168 perangkat daerah	617 perangkat daerah	91,41%
06	01	03	202	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	15 Kegiatan	83,33%
06	01	03	202	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	667 perangkat daerah	219 perangkat daerah	165 perangkat daerah	165 perangkat daerah	100%	165 perangkat daerah	549 perangkat daerah	82,31%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai tugas, fungsi dan perannya diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat Daerah. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 adalah "*Tingkat Maturitas SPIP*" dan "*Indeks Kepuasan Masyarakat*".

Berdasarkan realisasi capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2024, capaian indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,317 sesuai Laporan BPKP atas Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor PE.09.03/LHP-401/PW12/3/2024 Tanggal 19 Desember 2024. Nilai ini memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yang memiliki arti :

- 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta terdokumentasi dengan rapi.

- 2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, tetapi juga sudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi.
- 3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit kerja dan individu di dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai di organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap.

Hasil yang dicapai pada indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian kinerja 100,21% dari target yang ditetapkan yaitu 3,310. Capaian ini dalam kategorisasi kinerja sesuai dengan Skala Nilai Penilaian Kinerja berdasar tingkat capaian kinerja masuk kategori “Sangat Baik” dengan Status Capaian “Tercapai”. Capaian ini didapat dengan adanya dukungan semua perangkat daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pada indikator sasaran Inspektorat Daerah yang kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, realisasi capaian kinerja sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah adalah 83,97 sesuai Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Purworejo Semester 2 Tahun 2024. Hasil indek kepuasan masyarakat atas pelayanan Inspektorat Daerah telah melampaui target dengan capaian kinerja 100,56% dari target yang ditetapkan sebesar 83,50. Capaian ini dalam kategorisasi kinerja sesuai dengan Skala Nilai Penilaian Kinerja berdasar tingkat capaian kinerja masuk kategori “Sangat Baik” dengan Status Capaian “Tercapai”. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2024 (thn n- 2)	Th. 2025 (thn n- 1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	Th. 2024 (thn n- 2)	Th. 2025 (thn n- 1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan (Renstra 2021-2026)											
1	Nilai Area Penguatan Pengawasan	-	-	3,1	3,12	3,19	-	3,155	-	3,19	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	83,5	84	84,5	-	83,97	-	84,5	-	
	Indikator sasaran (Renstra 2021-2026)											
1	Tingkat Maturitas SPIP	-	-	3,31	3,325	3,50	-	3,317	-	3,50	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	83,5	84	84,5	-	83,97	-	84,5	-	
	Indikator program (renstra 2021-2026)											
	Program Penyelenggaraan Pengawasan											
1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	
2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi											
1	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	
2	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
	Indikator Tujuan (Renstra 2025-2029)											
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			3,310	3,325	3,333	3,341	3,317		3,333	3,341	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	71,55	72,24	72,93	65,26*	71,55	72,24	72,93	Nilai hasil evaluasi tahun 2023 atas tahun 2022

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2024 (thn n- 2)	Th. 2025 (thn n- 1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	Th. 2024 (thn n- 2)	Th. 2025 (thn n- 1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator sasaran (Renstra 2025-2029)											
1	Nilai Kapabilitas APIP			3,000	3,163	3,218	3,273	3,11		3,218	3,273	
2	Nilai Manajemen Risiko Indeks			3,098	3,165	3,232	3,299	3,098		3,232	3,299	
3	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			3,096	3,130	3,164	3,198	3,096		3,164	3,198	
4	Indek Integritas Nasional			76,61	77,42	78,24	79,05	76,61		78,240	79,05	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	71,55	72,24	72,93	65,26*	71,55	72,24	72,93	Nilai hasil evaluasi tahun 2023 atas tahun 2022
	Indikator Program (renstra 2025-2029)											
	Program Penyelenggaraan Pengawasan											
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	-	82,45	82,736	83,302	82,17	-	82,736	83,302	
2	Persentase laporan pengawasan yang diterbitkan	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	
3	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi											
4	Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	
5	Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan/asistensi/evaluasi	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
6	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	

Untuk pencapaian kinerja program-program yang dilaksanakan Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan sesuai rencana kerja dan terealisasi 100%. Pencapaian kinerja program Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel TC-30a berikut :

Tabel T-C.30a.Pencapaian Kinerja Program Tahun 2024
Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	100%	100%
		Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	100%

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah, perlu ditetapkan isu-isu penting yang akan menjadi rumusan kebijakan dalam penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah pada Tahun 2026. Isu-isu penting tersebut diambil dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun sebelumnya. Isu-isu penting yang muncul menjadikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat baik yang berasal dari kondisi internal maupun kondisi eksternal antara lain :

Isu Internal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Inspektorat Daerah tersebut antara lain :

1. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
2. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada pengawasan Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Belum optimalnya pelaksanaan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan internal.
4. Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan.
5. Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan aduan masyarakat berkadar pengawasan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal lain dan aparat penegak hukum

7. Belum optimalnya peran APIP sebagai consultant dan catalyst di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
8. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.
9. Kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada semua tim pemeriksa.
10. Tidak optimalnya pengembangan inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
11. Penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko belum dilakukan pada semua pengawasn yang dilakukan.
12. Belum idealnya perbandingan SDM pengawasan dengan penugasan pengawasan yang dilaksanakan.

Adapun isu eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Inspektorat Daerah tersebut antara lain :

1. Perkembangan paradigma dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinamis, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Dukungan kebijakan nasional, provinsi dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
3. Dukungan kebijakan penguatan APIP dalam penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan prasarana pendukung pengawasan.
4. Nota kesepahaman kerjasama pengawasan internal antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi yang semakin cepat.
6. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kurang responsifnya Pemerintahan Desa dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan desa Pemerintahan Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui keselarasan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan perangkat daerah setelah dilakukan pembahasan dalam forum perangkat daerah, dan kajian program dan kegiatan.

Sesuai rancangan awal RKPD pada tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengusulkan tiga program terdiri dari :

- 1 program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang didukung dengan adanya 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.
- 2 program pada fungsi Pendukung Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan yang didukung 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Berdasar Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 hasil analisa kebutuhan perangkat daerah tahun 2026 terdapat beberapa sub kegiatan yang pagu indikatifnya berkurang dan bertambah. Bertambah dan berkurangnya pagu indikatif sub kegiatan dari pagu indikatif Rancangan awal RKPD tahun 2026 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan yang didasarkan pada ketercukupan anggaran pada tahun tahun sebelumnya, perubahan target indikator/output sub

kegiatan, penyesuaian standar harga satuan dan perubahan rencana desain kegiatan. Selain itu juga terdapat penyesuaian indikator kinerja kegiatan pada beberapa kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten seperti : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil analisa kebutuhan Inspektorat Daerah Tahun 2026 menunjukkan bahwa jumlah anggaran pengawasan yang ada masih belum memenuhi *mandatory spending* pengawasan sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan ketercukupan anggaran pengawasan pada tahun 2026 mempertimbangkan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun berkenaan yang terbatas. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan ketercukupan anggaran pengawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku direncanakan akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 digunakan untuk mendukung operasional pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah pada tahun 2026. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 juga sudah memasukkan program/kegiatan yang didalamnya terdapat mandatory penugasan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Bidang Urusan Inspektorat Daerah				16.132.593.767,00	Bidang Urusan Inspektorat Daerah				15.000.050.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purworejo	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten	100%	13.041.971.767,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purworejo	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	14.237.267.100,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Dokumen	29.295.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 dokumen	17.636.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	23.104.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	15.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	891.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.299.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	2.436.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.905.883.567,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Laporan	12.621.976.700,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	9.896.450.267,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	12.620.193.600,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.644.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	4.060.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	1.728.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan	1.783.100,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	2.744.100,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11 Laporan	912.600,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.527.700,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.216.400,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	912.600,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.674.663.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 dokumen	689.097.800,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.220.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	11.898.600,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	74.668.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	1.516.425.200,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang	674.379.200,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	10.154.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	2.820.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	22.196.400,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	346.293.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 dokumen	168.462.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.292.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.105.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.184.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	39.056.700,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	13.107.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.536.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.631.400,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.890.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.905.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.332.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.181.900,00	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	27 Paket	10.183.700,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.900.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.625.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.526.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.623.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	22.867.700,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.810.600,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5.526.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.470.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis	399.705.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	44 Unit	216.424.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	27.437.000,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	24.632.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	292.301.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	167.863.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	79.967.500,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	23.929.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	329.095.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	203.529.100,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	300.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.831.900,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153.561.100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	199.014.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.668.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu	5 Jenis	354.290.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	319.228.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	85.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	77.660.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	67.390.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	48.200.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	134.345.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.368.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	27.045.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	23.050.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Purworejo	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	1.536.905.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Purworejo	Persentase Laporan Pengawasan yang Diterbitkan	100%	558.091.300,00	
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	82,74%		
								Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Dokumen	1.176.616.900,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7 Dokumen	335.426.800,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52 Laporan	155.097.900,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 Laporan	38.050.600,00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	72 Laporan	147.896.400,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	36.377.700,00	
	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	20.721.300,00	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	3.235.000,00	
	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	62.705.600,00	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28 Laporan	24.844.400,00	
	Pengawasan Desa	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	14 Laporan	78.142.400,00	Pengawasan Desa	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	29 Laporan	44.419.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Kesepakatan	29.828.100,00	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	60.280.700,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Dokumen	682.225.200,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	128.219.200,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Dokumen	360.288.600,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	222.664.500,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	62.247.000,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	23.162.700,00	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	99 Laporan	298.041.600,00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan	199.501.800,00	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Purworejo	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	1.553.716.500,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Purworejo	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan yang Ditetapkan	100%	204.691.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%				Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan/asistensi/evaluasi	100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	113.594.900,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	12.504.100,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	110.374.200,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	10.511.400,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3.220.700,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	1.992.700,00	
	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	4 laporan	1.440.121.600,00	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Purworejo	Jumlah dokumen hasil Pendampingan dan Asistensi	4 laporan	192.187.500,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	16.107.500,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	4.669.700,00	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	195 perangkat daerah	342.866.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	168 perangkat daerah	80.374.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	890.403.900,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	71.037.500,00	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah	190.744.200,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah	36.105.500,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 disusun berdasarkan hasil pencermatan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan hasil penelaahan kondisi lapangan pada tahun sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain dari internal Inspektorat Daerah juga ditampung usulan dari stakeholder terkait dan masyarakat secara langsung apabila ada yang disampaikan pada saat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dengan dihadiri unsur DPRD Kabupaten Purworejo sebagai Narasumber, unsur Perangkat Daerah, dan unsur Perangkat Daerah Pemangku Wilayah Kecamatan. Kesepakatan dalam Forum Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo dengan nomor 000.7.2.6/351/2025. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sehingga penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mempedomani dan selaras dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional dan perencanaan pembangunan di atasnya. Merujuk hal tersebut di atas maka dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 secara berjenjang harus mempedomani, mengacu dan memperhatikan arah kebijakan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pencapaian Asta Cita Ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan” khususnya pada Program prioritas ke 3 yaitu Reformasi Hukum Politik dan Birokrasi dan Program prioritas ke 4 yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kegiatan prioritas utama adalah Pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil telaah terhadap kebijakan perencanaan lainnya yaitu terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mendukung pencapaian 35 delegasi Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Program Delegasi ke 3 yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan perangkat daerah menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah ditetapkan sasaran perangkat yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)”. Sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat daerah diamanahkan untuk mendukung tercapainya misi kelima yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,

Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi” khususnya Program ke 3 yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo yang sudah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan perangkat daerah yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator tujuan yaitu :

- 1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Adapun sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai yaitu :
- 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan indikator sasaran :
 - a. Nilai Kapabilitas APIP
 - b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
 - c. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
 - d. Indek Integritas Nasional
 - 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32a
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,333
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,24
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	3,218
		Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,232
		Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,164
		Indek Integritas Nasional	77,63
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,24

3.3.Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang aktivitas didalamnya menghasilkan output dan keluaran yang mendukung indikator pencapaian target visi misi Kabupaten

Purworejo pada tahun 2026. Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain berpedoman pada kaidah dan aturan yang berlaku, dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 juga harus memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sehingga capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal.

Program dan kegiatan beserta sub kegiatan dalam rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 meliputi :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistens.

B. Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - c. Reviu Laporan Kinerja.
 - d. Reviu Laporan Keuangan.
 - e. Pengawasan Desa.
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal.
 - g. Monitoring dan Eavaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - a. Perumusan Kabijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
4. Pendampingan dan Asistensi.
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - d. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Penyediaan Bahan/Material.
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan Mebel.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dalam rangka pengarusutamaan gender di Kabupaten Purworejo, terdapat sub kegiatan pada Inspektorat daerah yang diarahkan untuk mendukung pengarusutamaan gender yaitu :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 Subkegiatan pengawasan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah mendukung pengarusutamaan gender melalui pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Berbasis Gender. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pemerintah kabupaten Purworejo. Ruang lingkup evaluasi meliputi Perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Perangkat Daerah sejak disusunnya rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan. Melalui

evaluasi perencanaan berbasis gender diharapkan pengarusutamaan gender di kabupaten Purworejo dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku

2. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Subkegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas mendukung pengarusutamaan gender melalui kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian korupsi dan gratifikasi yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Sosialisasi yang dilakukan oleh UPG bertujuan untuk membangun dan meningkatkan integritas dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan keterwakilan Perempuan baik dari peserta maupun tim sosialisasi (Penyuluh Anti Korupsi). Adanya keterwakilan peserta perempuan dalam pelaksanaan diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman bahaya korupsi dan gratifikasi serta pencegahannya ke masyarakat sejak dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Melalui kegiatan ini diharapkan Indeks Integritas Kabupaten Purworejo dapat meningkat.

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mendukung pengarusutamaan gender dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki baik teknis maupun non teknis. Untuk meningkatkan kesetaraan kompetensi, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengirimkan semua pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pemilihan jenis pelatihan dan pendidikan dilakukan sesuai gap kompetensi dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Semua pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan pelatihan teknis dan substansif. Melalui kegiatan ini diharapkan fungsional dan pelaksana memiliki kompetensi yang merata dan kapabilitas yang unggul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Inspektorat Daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan.

Rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel TC-33.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWOREJO
TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Praktiran Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiran Mula Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			INSPEKTORAT DAERAH					15.000.050.000,00							17.756.631.204,00				
	6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					15.000.050.000,00							17.756.631.204,00				
	6	01	INSPEKTORAT DAERAH					15.000.050.000,00							17.756.631.204,00				
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %			100 %	14.237.267.100,00			100 %	14.363.766.764,00				
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	45 dokumen	17.636.800,00		-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	29.914.650,00				
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112 Dokumen			24 Dokumen	15.200.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	22 Dokumen	23.104.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	980.760,00	INSPEKTORAT DAERAH			
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			22 Laporan	2.436.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	22 Laporan	5.829.890,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	45 Laporan	12.621.976.700,00		-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	10.867.631.884,00				
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	315 Orang/bulan			63 Orang/bulan	12.620.193.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	63 Orang/bulan	10.877.255.254,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Perantara dan													
						Jumlah Dokumen Perantara dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	4.009.060,00	INSPEKTORAT DAERAH			
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	4.466.770,00	INSPEKTORAT DAERAH			
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	225 Laporan	44 Laporan	1.783.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	44 Laporan	1.900.800,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	11 Laporan	912.600,00		-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	3.018.510,00				
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	1.680.470,00	INSPEKTORAT DAERAH			

[illegible]

No	Kode				Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen		0,00 Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		1.465.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	105 Paket			27 Paket	10.183.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	26 Paket	32.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan			12 Laporan	6.625.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	12 Laporan	17.490.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			12 Laporan	54.623.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	12 Laporan	121.017.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	6.810.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	2 Dokumen	25.154.470,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	2.470.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	2 Dokumen	6.078.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			44 Unit	216.424.000,00			-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	443.914.020,00	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit			26 Unit	24.632.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	26 Unit	25.889.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit			15 Unit	167.863.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	22 Unit	322.319.580,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	23.929.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	6 Unit	95.704.840,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			36 Laporan	203.529.100,00			-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	362.006.700,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan			12 Laporan	300.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	12 Laporan	275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	153.561.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	12 Laporan	142.816.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	46.668.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	12 Laporan	218.915.400,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode				Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01	01	2.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			5 Laporan	319.228.000,00			-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	407.431.200,00	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			1 Unit	39.950.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	1 Unit	48.356.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			4 Unit	77.660.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	4 Unit	107.272.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	840 Unit			68 Unit	48.200.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	68 Unit	74.129.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	130.368.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	1 Unit	147.779.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 Unit			19 Unit	23.050.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	19 Unit	29.894.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Pengawasan yang Diterbitkan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100% 85% 100%			100 % 82,74 % 100 %	558.091.300,00						100% 83,302% 100%	1.685.868.800,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35 Laporan			7 Dokumen	335.426.800,00			-	-	Masyarakat	7 Laporan	1.289.551.340,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	260 Laporan			52 Laporan	38.050.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	52 Laporan	171.178.480,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	336 Laporan			60 Laporan	36.377.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	60 Laporan	157.035.120,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0003	Revisi Laporan Kinerja														
						Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	5 Laporan			1 Laporan	3.235.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	1 Laporan	23.119.030,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0004	Revisi Laporan Keuangan														
						Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	142 Laporan			28 Laporan	24.844.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	28 Laporan	68.976.160,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	214 Laporan			29 Laporan	44.419.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	29 Laporan	85.958.730,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan			3 Kesepakatan	60.280.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	1 Kesepakatan	32.836.100,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	30 Dokumen	6 Dokumen	128.219.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	6 Dokumen	750.447.720,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	2 Laporan	222.964.500,00			-	-	Masyarakat	2 Laporan	395.317.460,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	2 Laporan	23.162.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	2 Laporan	68.471.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	617 Laporan	99 Laporan	199.501.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	99 Laporan	327.845.760,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pengawasan yang Ditetapkan Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan/asistensi/evaluasi	- 100 % 100 %	100 % 100 %	204.691.600,00						-	1.706.993.640,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	2 Dokumen	12.504.100,00			-	-	Masyarakat	-	124.954.360,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	3 Rekomendasi	10.511.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	3 Rekomendasi	121.411.620,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1.992.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	3 Rekomendasi	3.542.770,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil Pendampingan dan Asistensi	-	4 laporan	192.187.500,00			-	-	Masyarakat	-	1.582.036.250,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	6 perangkat daerah	4.666.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	6 perangkat daerah	17.718.360,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	862 perangkat daerah	168 perangkat daerah	80.374.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	168 perangkat daerah	377.152.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan	2 Kegiatan	71.037.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	2 Kegiatan	979.444.070,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	816 perangkat daerah	165 perangkat daerah	36.105.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat	165 perangkat daerah	207.724.220,00	INSPEKTORAT DAERAH
J U M L A H									15.000.850.000,00							17.756.831.204,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 akan menyelenggarakan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang didukung 3 Program terdiri dari 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Alokasi pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka :

- a. Pengawasan intern (*assurance dan consulting service*) meliputi : pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, reviu laporan keuangan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- b. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi : pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
- c. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi : kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan pendukung operasional pengawasan seperti pengadaan sarpras, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pemeliharaan bangunan gedung kantor

Rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRA M/ HASIL KEGIATA N/ KELUAR AN SUB KEGIATA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
	Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah an					
		Bidang Urusan Inspektorat Daerah			15.000.050.000	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	14.237.267.100	
i		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 dokumen	17.636.800	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	15.200.000	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	2.436.800	
ii		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Laporan	12.621.976.700	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/b ulan	12.620.193.600	
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	-	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	-	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	44 Laporan	1.783.100	
iii		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11 Laporan	912.600	
1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRA M/ HASIL KEGIATA N/ KELUAR AN SUB KEGIATA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	912.600	
iv		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 dokumen	689.097.800	
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	
2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	11.898.600	
3		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	-	
4		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang	674.379.200	
5		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	63 Orang	2.820.000	
6		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0 Orang	-	
v		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 dokumen	168.462.100	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.105.000	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	13.107.800	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.631.400	
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.905.600	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	
7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	27 Paket	10.183.700	
8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.625.000	
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.623.000	

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRA M/ HASIL KEGIATA N/ KELUAR AN SUB KEGIATA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.810.600	
11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.470.000	
vi		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	44 Unit	216.424.000	
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	24.632.000	
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	167.863.000	
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	23.929.000	
vii		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	203.529.100	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	300.000	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153.561.100	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.668.000	
viii		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	319.228.000	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	77.660.000	
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	48.200.000	
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.368.000	
5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	19 Unit	23.050.000	

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRA M/ HASIL KEGIATA N/ KELUAR AN SUB KEGIATA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
			Dipelihara/Direhabilitasi			
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Pengawasan yang Diterbitkan	100%	558.091.300	
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	82,74%		
			Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%		
I		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7 Dokumen	335.426.800	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 Laporan	38.050.600	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	36.377.700	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	3.235.000	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28 Laporan	24.844.400	
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	29 Laporan	44.419.200	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepaka tan	60.280.700	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	128.219.200	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	222.664.500	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	23.162.700	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan	199.501.800	
III		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pengawasan yang Ditetapkan	100%	204.691.600	
			Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan/asiste nsi/evaluasi	100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2 Dokumen	12.504.100	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomen dasi	10.511.400	

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRA M/ HASIL KEGIATA N/ KELUAR AN SUB KEGIATA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomen dasi	1.992.700	
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil Pendampingan dan Asistensi	4 laporan	192.187.500	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangka t daerah	4.669.700	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	168 perangka t daerah	80.374.800	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	71.037.500	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangka t daerah	36.105.500	

4.2.Dukungan Program Prioritas Nasional, Program Delegasi Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo

Program kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja Program Prioritas Nasional, Program Delegasi Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo.

a. Dukungan Program Prioritas Nasional

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Inspektorat Daerah yang mendukung program prioritas nasional diarahkan untuk mendukung Asta Cita ketujuh yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan” khususnya pada program prioritas ketiga yaitu Reformasi Hukum Politik dan Birokrasi melalui aktifitas Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan program prioritas keempat yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui aktifitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
7	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	
	Priogram prioritas 3 Reformasi Hukum Politik dan Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	Priogram prioritas 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu melalui aktifitas :
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Rencana Kerja Inspektorat Daerah 2026 juga mendukung Prioritas Nasional ke 7 pada kegiatan prioritas utama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pelaksanaan :

1. Program : Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
Subkegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Selain mendukung Asta cita program prioritas nasional, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diamanatkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional sesuai Surat Edaran Bersama Menteri DalamNegeri dan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Dukungan Program Delegasi Provinsi

Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi diarahkan pada dukungan pencapaian pelaksanaan program delegasi provinsi Jawa Tengah yang ketiga yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK. Aktifitas-aktifitas kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program prioritas tersebut diantaranya melalui Program Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan aktifitas kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendampingan Desa Anti Korupsi pada subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan kegiatan Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Purworejo dan Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Daerah pada subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Aktifitas yang mendukung delegasi Provinsi Jawa tengah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Pendampingan desa anti korupsi
		Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar

c. Dukungan Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo

Dukungan terhadap pencapaian kinerja Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi Ke-5 Bupati Purworejo pada Program prioritas ketiga yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Dukungan yang diberikan melalui pelaksanaan program-program pada Inspektorat Daerah yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan pengawasan yang terencana dan sistematis, program ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan dilaksanakan baik secara preventif maupun represif, dengan pendekatan pengawasan intern, audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, dan pemantauan.

Aktifitas yang dilaksanakan dalam program ini meliputi penyelenggaraan Pengawasan Internal dan penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang meliputi Pengawasan

Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerja Sama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Hasil dari program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemerintahan

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Program ini merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat sistem pengawasan intern pemerintah secara menyeluruh dan berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan tersusunnya kebijakan pengawasan yang adaptif, implementatif, dan mampu menjawab dinamika serta kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan perumusan kebijakan pengawasan, dilakukan penyusunan regulasi, pedoman, standar, dan prosedur pengawasan yang terintegrasi, berbasis risiko, dan selaras dengan arah kebijakan nasional, sedangkan pendampingan dan asistensi pengawasan menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan kebijakan pengawasan di seluruh unit kerja melalui peningkatan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan aparatur dalam penerapan sistem pengendalian intern, penegakan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Aktifitas yang dilaksanakan dalam program ini meliputi penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi yang meliputi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Diharapkan, pelaksanaan program ini mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program pendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aktifitas kegiatan yang dilaksanakan meliputi administratif, teknis, dan operasional, yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah seperti : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, Administrasi BMD, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan BMD, Penyediaan jasa Penunjang, dan Pemeliharaan BMD.

Program-program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah diharapkan mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Pitulungan khususnya pada program unggulan keempat Sejahtera Wargane di kegiatan Pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Aktifitas yang

mendukung program unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026
4	Sejahtera Wargane	Pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu
			2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
			4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
			5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Selain mendukung program unggulan yang keempat, Inspektorat Daerah juga berperan untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan program pitulungan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemerintahan.

4.3.Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat daerah dapat dikatakan berhasil atau tercapai apabila pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan telah sesuai ataupun melebihi target kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel yang diukur melalui berbagai indikator strategis yang mencerminkan efektivitas pengawasan, peningkatan akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dalam penetapannya berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Purworjo Tahun 2025-2045 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat daerah Kabupaten Purworejo tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan indikator tujuan perangkat daerah yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini

menunjukkan tingkat kematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP, semakin kuat sistem yang terbangun untuk mencegah penyimpangan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Nilai pada indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi atas tingkat kematangan SPIP pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator tujuan perangkat daerah yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini menilai sejauh mana perangkat daerah mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja mereka secara transparan dan akuntabel. Semakin tinggi nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), semakin baik pula kualitas akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah. Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil Evaluasi atas level Kapabilitas APIP pada tahun n yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Indikator Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan indikator sasaran perangkat daerah dan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini menunjukkan Level tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Semakin tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan semakin kuat dan profesional fungsi pengawasan internal oleh APIP dalam suatu pemerintah daerah. Nilai Kapabilitas APIP diperoleh dari hasil Evaluasi atas level Kapabilitas APIP pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

4. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) .

Indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan indikator sasaran perangkat daerah dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Semakin tinggi nilai Manajemen Risiko Indeks menunjukkan semakin baik pula kemampuan instansi tersebut dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) diperoleh dari hasil Evaluasi atas kematangan penerapan Manajemen Risiko pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

5. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Indikator Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah indikator sasaran perangkat daerah dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini merupakan Indeks pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berhasil. Semakin tinggi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi semakin

efektif dan berhasil. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) diperoleh dari hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

6. Indeks Integritas Nasional

Indikator Indeks Integritas Nasional merupakan indikator sasaran perangkat daerah dan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini menggambarkan tingkat integritas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil survei dan analisis data dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli yang dilaksanakan oleh KPK. Semakin tinggi Indeks Integritas Nasional suatu daerah menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan keberhasilan daerah tersebut dalam membangun budaya antikorupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Target Indikator Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target 2026	Keterangan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah				
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,333	Tujuan PD
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,24	Tujuan PD
3	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,218	Sasaran PD
4	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,232	Sasaran PD
5	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,164	Sasaran PD
6	Indek Integritas Nasional	Angka	78,24	Sasaran PD
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,24	Sasaran PD
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah				
1	Indek Integritas Nasional	Angka	78,24	IUP
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,333	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,218	Permendagri No. 18 Tahun 2020

BAB V

P E N U T U P

5.1.Catatan Penting

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan/subkegiatan pada tahun 2026. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dalam penyusunannya telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2021-2026, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 beserta perubahannya, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026, memuat nama program/kegiatan/subkegiatan, waktu, lokasi, biaya serta gambaran yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai prioritas program kegiatan pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

5.2.Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan agar dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang hendak dicapai pada akhir tahun dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Memperhatikan prioritas sasaran dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam penganggaran pelaksanaan kegiatan
3. Memperhatikan indikator sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang ditargetkan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi berkala capaian kinerja pelaksanaan sebelumnya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan.
5. Memperhatikan kecukupan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
6. Memperhatikan isu-isu penting dan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi perangkat daerah.

5.3.Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam membantu Bupati Purworejo membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah direncanakan dalam Renja Inspektorat Daerah secara efektif, efisien dan ekonomis;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan agar berjalan sesuai rencana kerja perangkat daerah

4. Melaksanakan perbaikan, perubahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan atas capaian kinerja yang belum sesuai rencana kerja berdasar hasil monitoring dan yang dilaksanakan.
5. Melaksanakan pelaporan pencapaian sasaran dan target program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 untuk dijadikan pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah pada tahun 2026 guna mencapai target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

